



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jln Jendral Ahmad Yani No. 17A Muara Enim

Telp/Fax: 0734 421194

www.pn.muaraenim.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Tahun 2023.

Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2023 dan mempersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2024. Selain itu laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada Masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

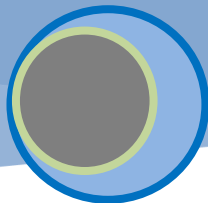
Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Laporan Penyelesaian Kegiatan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH.,MH
NIP. 19781113 200212 1002

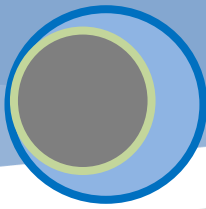




DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	5
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	12
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	13
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14
B. Penyelesaian Perkara	
- Jumlah sisa perkara yang diputus	15
- Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu	15
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	16
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi	16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	16
C. Akreditasi penjaminan mutu	
- POSBAKUM	18
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	19
- Mutasi	20
- Promosi	23
- Pensiun	23
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	23
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan.....	26
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	39
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum ..	39
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	41





BAB V Peningkatan pelayanan Publik	
- Pembangunan Zona Integritas	42
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	46
- Inovasi Pelayanan Publik	52
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	57
B. Evaluasi	60
BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan	62
B. Rekomendasi	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

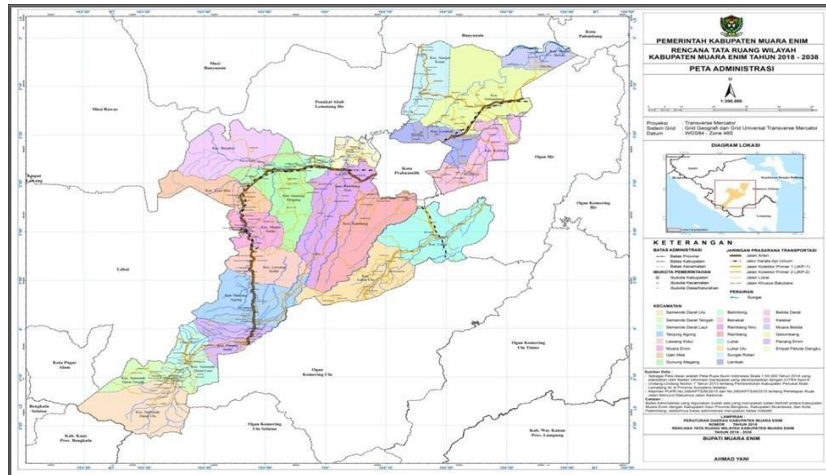
Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum.

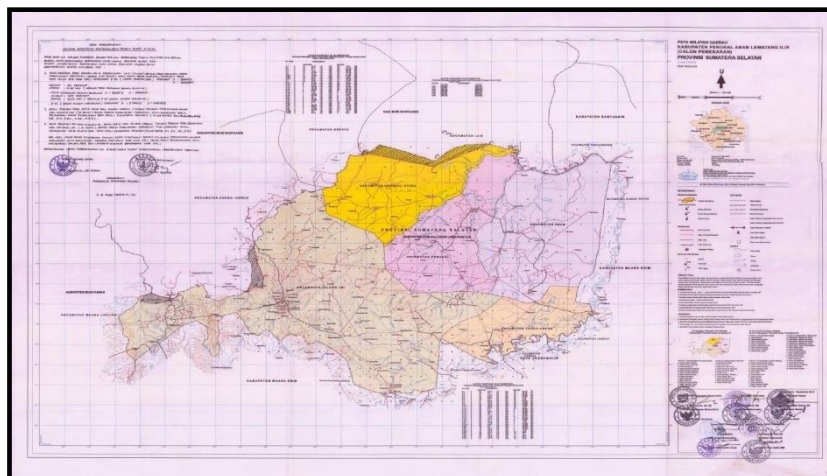
Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Kantor Pengadilan Muara Enim beralamat Jl. Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Gedung Pengadilan Negeri Muara Enim diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Bapak Suroto, SH pada tanggal 19 Juli 1976. Wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri



Muara Enim meliputi 2 (Dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Kecamatan dan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan.



Peta lokasi wilayah Yuridiksi Kabupaten Muara Enim



Peta lokasi wilayah Yuridiksi Kabupaten Muara Enim



TUGAS POKOK

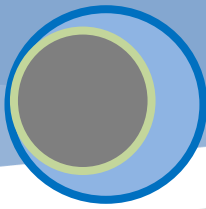
Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf- staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi





informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Pada tanggal 21 Juli 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Moh. Eka kartika EM, SH.,M.Hum meresmikan kenaikan type/kelas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Sejak berdirinya tahun 1976-2022, Pengadilan Negeri Muara Enim mempunyai 17 (Tujuh Belas) orang Ketua Pengadilan, yang tercantum di bawah ini :



No	NAMA	MASA JABATAN
1.	ODJAK SOETISNA, SH	1978-1982
2.	SJAFEI HIDAJAT, SH	1982-1988
3.	MOHAMMAD HASBI, SH	1988-1989
4.	LEO LUHUT HUTAGULUNG, SH	1989-1991
5.	H. ACHJAR LUBIS, SH	1991-1996
6.	SULTONI MOHDALLY, SH	1996-1998
7.	H. UMAR HAMDAN	1998-2004
8.	H. HERRI SWANTORO, SH.,MH	2004-2006
9.	EKO TUNGGUL PRIBADI, SH	2006-2008
10.	H. AGUSTI, SH.,MH	2008-2009
11.	FIRMAN, SH	2009-2011
12.	KAMALUDIN, SH.,MH	2011-2014
13.	ABU HANIFAH, SH.,MH	2014-2016
14.	AS'AD RAHIM LUBIS, SH.,MH	2016-2019
15.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH	2019-2021
16.	ELVIN ADRIAN, SH., MH	2021-2023
17.	Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH	2023-SEKARANG

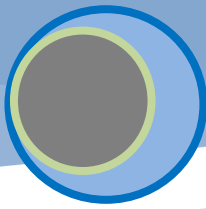
B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”





Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

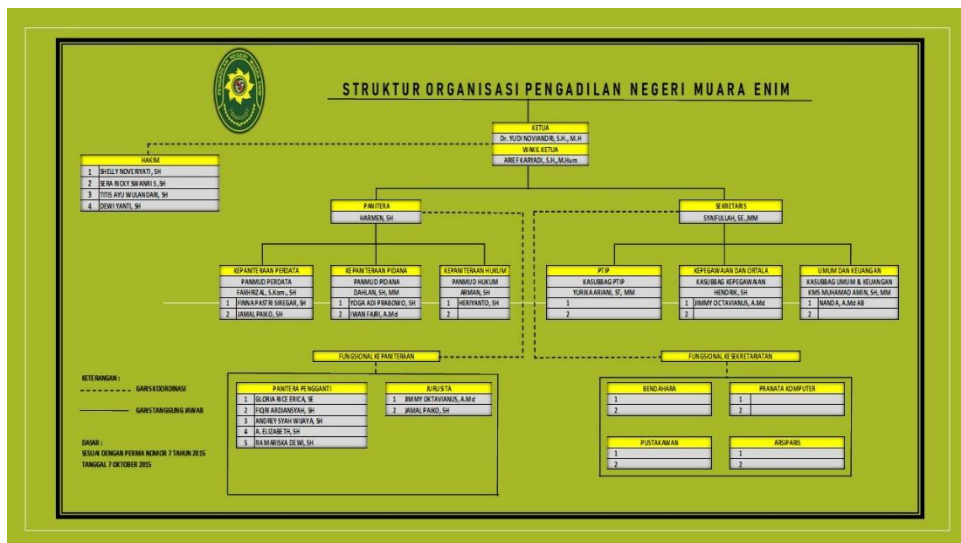
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2023, terdiri dari :



1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda :
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Hukum
5. Kasubbag :
 - Kasubbag Umum dan Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
6. Fungsional Panitera Pengganti
7. Fungsional Jurusita
8. Fungsional Umum/Pelaksana

Bagan Struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :



BAB II

PENGELOLAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

a. Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	62	783	799	46	Pidana Biasa
		0	23	23	0	Pidana Anak
		0	33	33	0	Pidana cepat
		0	0	0	0	Pidana singkat/ringan/lain
		0	0	0	0	Pidana pra peradilan
		0	3160	3160	0	Pidana lalu lintas

Perkara Perdata

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Perdata	16	34	41	9	Gugatan
		1	26	27	0	Gugatan sederhana
		1	49	49	1	Permohonan



b. Keadaan perkara di tingkat Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara banding 2023	Perkara yang putus tahun 2023	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	35	27	Pidana Biasa
		2	1	Pidana Anak
2.	Perdata	17	14	Gugatan

c. Keadaan perkara di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara kasasi 2023	Perkara yang putus tahun 2023	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	4	0	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	7	2	Gugatan

d. Keadaan perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Perkara PK 2023	Perkara yang putus tahun 2023	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Pidana	2	2	Pidana Biasa
		0	0	Pidana Anak
2.	Perdata	0	0	Gugatan



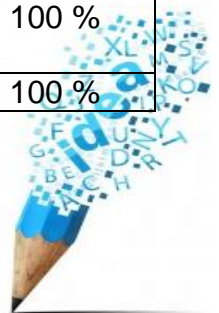
B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

No	Satuan Kerja	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	Ket
Pengadilan Negeri Muara Enim						
1.	Pidana	62	783	799	46	Pidana Biasa
		0	23	23	0	Pidana Anak
		0	33	33	0	Pidana cepat
		0	0	0	0	Pidana singkat/ingan/lain
		0	0	0	0	Pidana pra peradilan
		0	3160	3160	0	Pidana lalu lintas
2.	Perdata	16	34	41	9	Gugatan
		1	26	27	0	Gugatan sederhana
		1	49	49	1	Permohonan

b. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu

No	Satuan Kerja	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus	Perkara putus tepat waktu	Persentase perkara yang diputus tepat waktu	
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM							
1.	Pidana	Pidana Biasa	62	783	799	799	100 %
		Pidana Anak	0	23	23	23	100 %
2.	Perdata	Gugatan	16	34	41	41	100 %
		Gugatan sederhana	1	26	27	27	100 %
		permohonan	1	49	49	49	100 %



c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

No	Satuan Kerja		Sisa tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara mengajukan			Perkara tidak ajukan		
						Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM											
1.	Pidana	Pidana Biasa	62	783	799	21	14	0	778	785	799
		Pidana Anak	0	23	23	2	0	0	21	23	23
2.	Perdata	Gugatan	16	34	41	14	6	0	27	35	41
		Gugatan sederhana	1	26	27	0	0	0	27	27	27
		permohonan	1	49	49	0	0	0	49	49	49

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi	Persentase perkara perdata yang berhasil mediasi
Pengadilan Negeri Muara Enim				
1.	Perdata Gugatan	34	1	2,94 %

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diajukan diversifikasi	Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	Persentase perkara pidana anak yang berhasil diversifikasi
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim	1	1	100 %



C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

- **POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2023 mendapat anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 38.400.000,-. Realisasi untuk kegiatan posbakum ini adalah :

No	Satuan kerja	Pagu DIPA	Total realisasi		Sisa	Ket
			Rupiah	Persentase		
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM						
1.	Posbakum	Rp 38.400.000,-	Rp 38.400.000,-	100 %	0	

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/63/HK.03/I/2023 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum

ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yang terdiri dari 6 (Enam) orang Hakim dan 20 (Dua Puluh) pegawai.

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/c	1	1	2
III/a	3	1	4
III/b	2	2	4
III/c	3	2	5
III/d	6	3	9
IV/a	1	0	1
IV/b	1	0	1
Jumlah	17	9	26

b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana (S-3)	1	0	1
Sarjana (S-2)	3	1	4
Sarjana (S-1)	11	7	18
Sarjana Muda	2	1	3
SMTA	-	-	-
SMP	-	-	-
SD/SR	-	-	-
Jumlah	17	9	26



c. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Teknis / Non teknis / Staf

Jabatan Teknis/Non teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Hakim	-	-	-	-	1	3	2	0	3	3
Calon Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panitera	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Panmud	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-
Kasubbag	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1
PP	-	-	-	-	2	3	-	-	2	3
Jurusita	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf	-	-	1	1	2	1	-	-	3	2
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	1	14	8	2	-	17	9

a. Mutasi

Adapun mutasi selama tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk

Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. HARMEN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pagaralam menjadi Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2023.
2. FAKHRIZAL, SH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam menjadi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Mei 2023.



3. ARIEF KARYADI, SH, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Malang menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B terhitung melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Desember 2023.

b. Mutasi Keluar

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. IDHAM PRATAMA, SH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 17 April 2023.
2. YESSI ERVINA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 17 April 2023.
3. NOVA PARAMITA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 17 April 2023.
4. ESTER MERIYANTI SINAGA, SE, MM Staf Kepgawaian Pengadilan Negeri Muara Enim mutasi menjadi Staf Badan Peradilan Umum, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 06 Oktober 2023.
5. JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 22 Desember 2023.



b. Promosi

1. SYAIFULLAH, SE, MM promosi jabatan menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Kelas IA/ Sekretaris kelas IA Seluruh Indonesia
2. DAHLAN, SH, MM promosi jabatan menjadi panitera pengganti Pengadilan Negeri Lahat
3. YURIKA ARIANI, ST, MM promosi jabatan menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim kelas IB
4. FAKHRIZAL, SH promosi jabatan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang
5. KMS MUHAMMAD AMIN, SH, MM promosi jabatan menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

c. Pensiun dan Meninggal

Pada tahun 2023 tidak ada pegawai yang pensiun dan meninggal.

d. Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data hakim yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2023 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Titis Ayu Wulandari, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20 Februari sd 4 Maret 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
2.	Sera Ricky Swanri, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20 Februari sd 4 Maret 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
3.	Titis Ayu Wulandari, SH	Pelatihan Pemantapan KEPPIH	13 Maret s/d 18 Maret 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

				MARI
4.	Shelly Noveriyati S, SH	Pelatihan Sertifikasi Peradilan Pidana Anak (SPPA)	24 Juli s/d 12 Agustus 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
5.	Joni Mauluddin Saputra, SH	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPH	29 Agustus s/d 01 September 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
6.	Joni Mauluddin Saputra, SH	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Pembangunan Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Di PT Palengbang Dan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan	22 sd 24 November 2023	Pengadilan Tinggi Palembang

Data Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada 2023 yaitu :

No.	Nama	Nama Diklat	TMT Diklat	Instansi Penyelenggara
1.	Syaifullah, SE, MM	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.	03 April s/d 06 April 2023	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Andrey Syah Wijaya, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia.	26 Juli s/d 09 05 Agustus 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI
3.	R.A Mariska Dewi, SH	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan	26 Juli s/d 09 05 Agustus 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI

		Umum Seluruh Indonesia.		
4.	Harmen, SH	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Pembangunan Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Di PT Palengbang Dan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan	22 sd 24 November 2023	Pengadilan Tinggi Palembang
5.	Syaifullah, SE, MM	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Pembangunan Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Di PT Palengbang Dan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan	22 sd 24 November 2023	Pengadilan Tinggi Palembang
6.	Yurika Ariani, ST, MM	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Pembangunan Zona Integritas Pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja Di PT Palengbang Dan Pengadilan Negeri Sumatera Selatan	22 sd 24 November 2023	Pengadilan Tinggi Palembang



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2023, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja pegawai	Rp 3,124,502,000	Rp 3,088,119,352	98,84	Rp 36,382,648
2	Belanja Barang	Rp 1,236,108,000	Rp 1,231,057,348	99,59	Rp 5,050,652
3	Belanja Modal	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	100	Rp 0
Total		Rp 4,390,610,000	Rp 4,349,176,700	99,06	Rp 41,433,300

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Total Realisasi		Sisa
			Rupiah	Persentase	
1	Belanja Barang	Rp 332,000,000	Rp 331,269,370	99.78	Rp 730,630
Total		Rp 332,000,000	Rp 331,269,370	99.78	Rp 730,630

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana



Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang

persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum *prototype* sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Kendaraan Roda 4 a. Kijang Innova	a. 2008	✓	-	-	-
	2. Kendaraan Roda 2					
	a. Honda NF.100	a. 2003	✓	-	-	-
	b. Honda NF.100	b. 2003	✓	-	-	-
	c. Honda Supra XNF 125 50	c. 2005	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG
	d. Honda Supra XNF 125 50	d. 2005	✓	-	-	STNK.AN .PT.PLG

Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2023 sebanyak satu (1) unit yang digunakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak empat (4) unit. Yaitu :

- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan.
- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub Kepegawaian.



- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti.
- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi baik warna hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Staf Umum dan Keuangan.

Adapun sarana dan prasarana pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain :

GAMBAR-GAMBAR SARANA DAN PRASARANA :



Ruang tunggu ramah anak



Ruang sidang anak

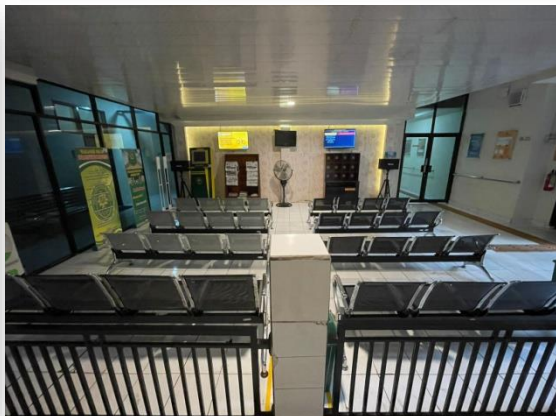
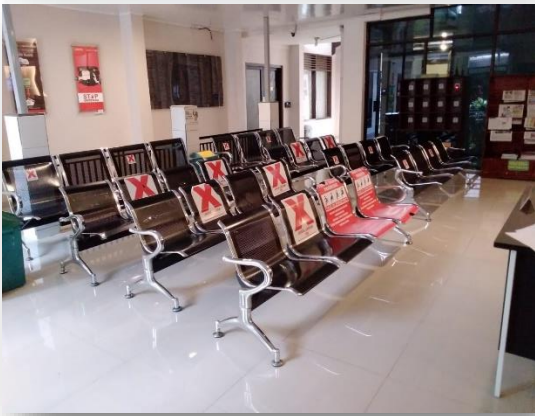


Ruang tunggu : anak korban, orang tua, BAPAS, penasehat hukum





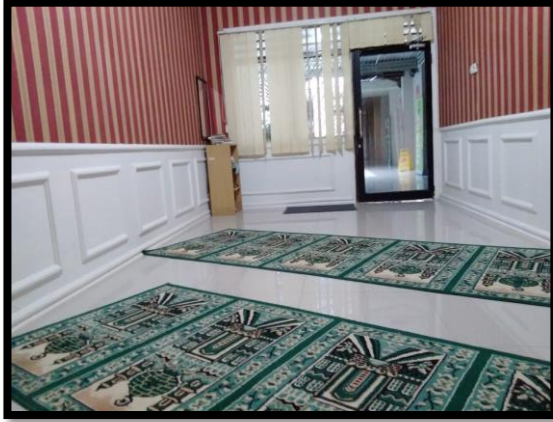
Ruang video Conference pada ruang sidang anak



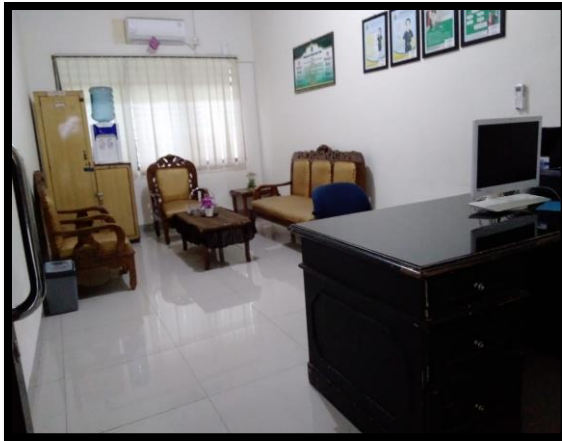
Ruang tunggu pengunjung dengan memasang TV jadwal sidang dan TV biaya radius perkara perdata



Wilayah smooking area



Musholla



Ruang POSBAKUM

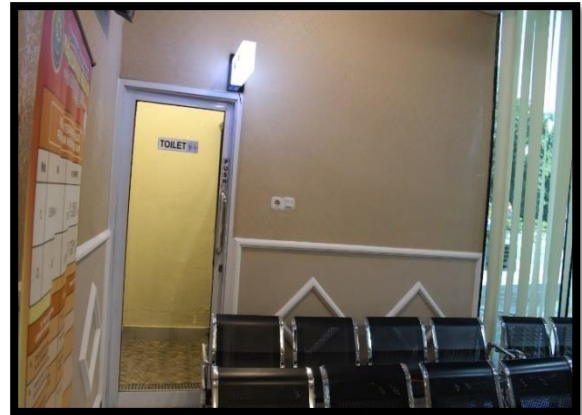


Ruang tunggu Jaksa



Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

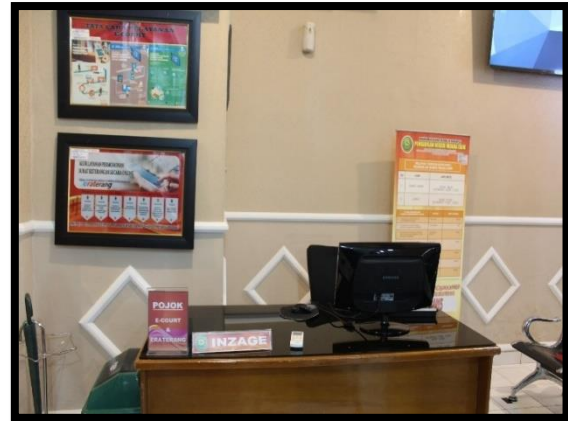




Kursi pengunjung PTSP dilengkapi dengan antrian pengunjung, media informasi (TV informasi) dan toilet khusus pengunjung



Meja Informasi dan Pengaduan

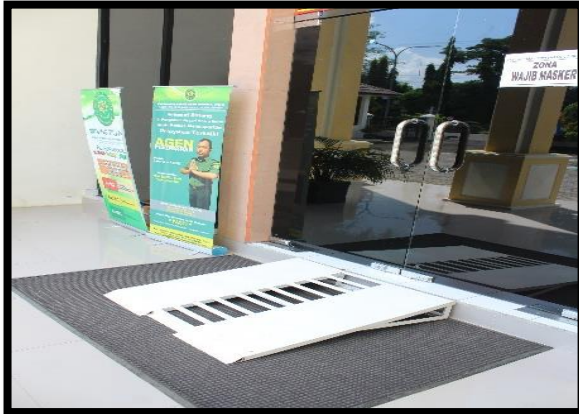


Meja Inzage



Ruang khusus tamu pengunjung





Jalur khusus difabel



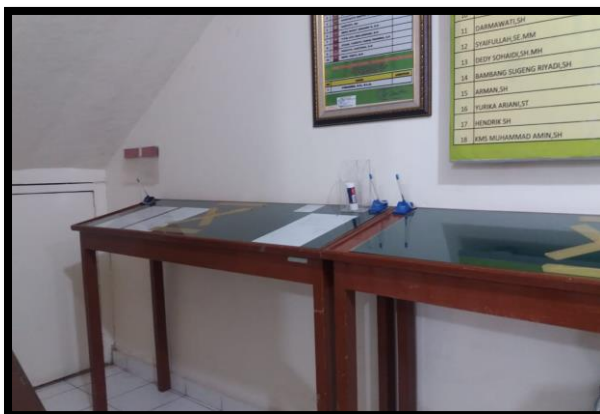
Area parkir khusus untuk disabilitas



Kursi roda untuk penyandang disabilitas



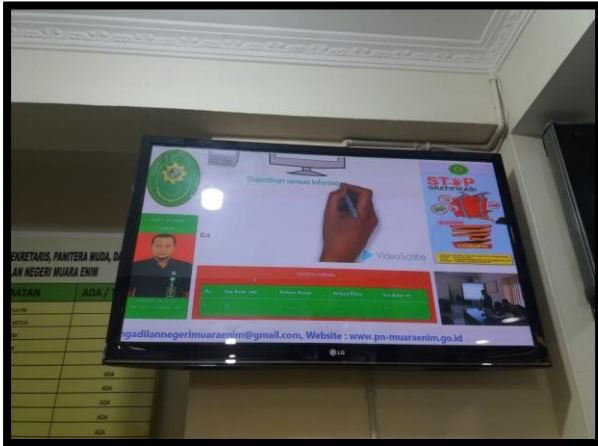
Kios K touchscreen untuk Survei IPK dan IKM



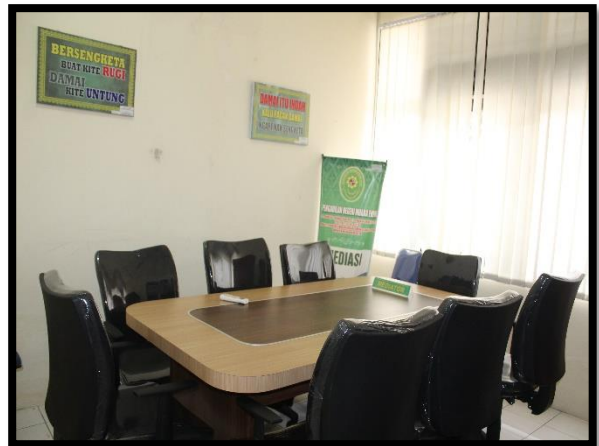
Meja untuk pengunjung menulis



Kotak saran manual



Televisi Informasi Profil



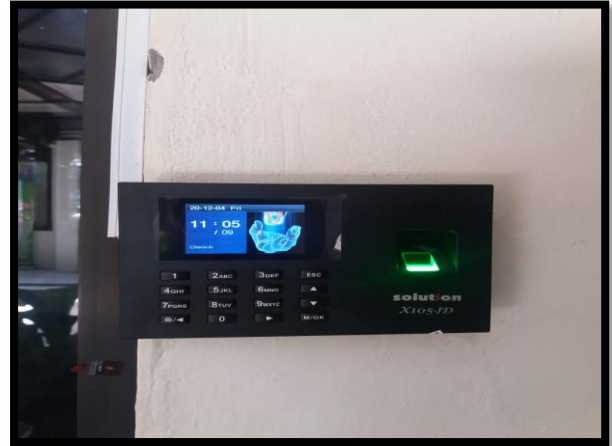
Ruang Mediasi



Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja



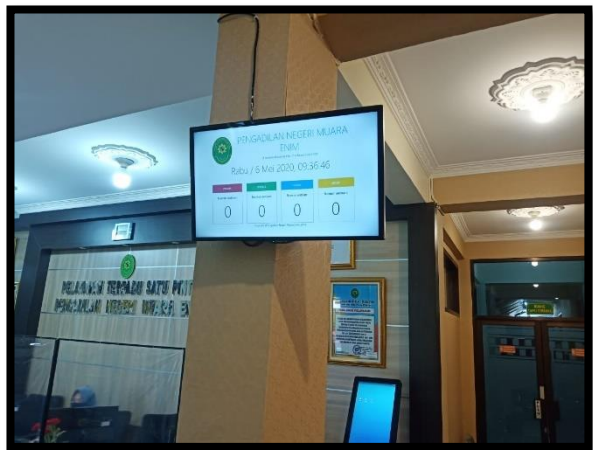
Ruang sidang Cakra



Akses masuk ruangan dengan finger scan / card scan



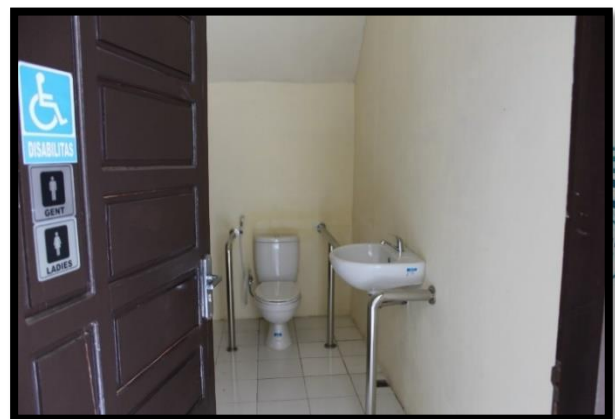
Ruang Media Center



Antrian pengunjung PTSP



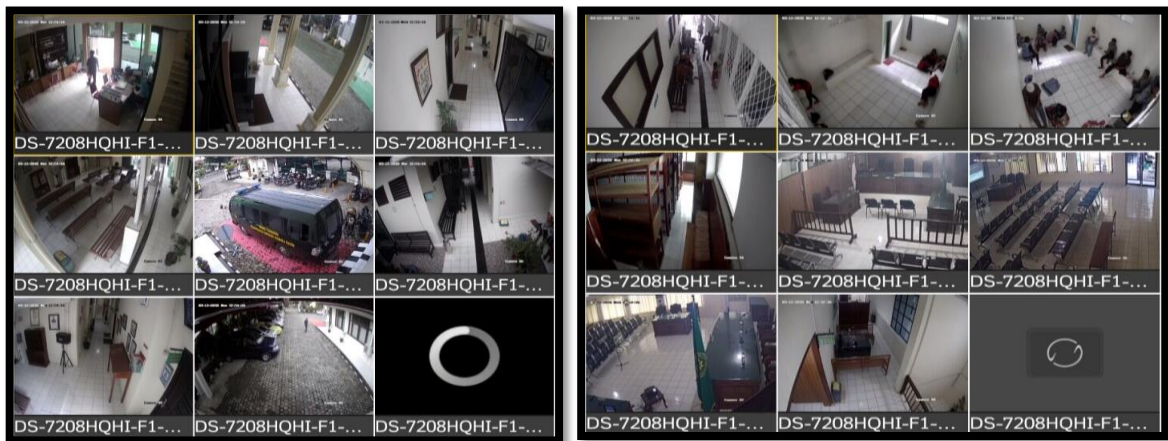
Ruang Laktasi



Toilet untuk Disabilitas



Ruang perpustakaan



CCTV





Mesin genset

Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Negeri Muara Enim					
	1. Rumah Dinas ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 11
	2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓	-	-	Sertifikat No. 12
	3. Rumah Dinas hakim	5	✓	-	-	Sertifikat No. 28
	4. Rumah Dinas Panitera	1	✓	-	-	Sertifikat No. 29
	5. Rumah Dinas Sekretaris	1	✓	-	-	Sertifikat No. 28

Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. Ruang Ketua	1	Baik
2. Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3. Ruang Hakim	1	Baik

4. Ruang Panitera	1	Baik
5. Ruang Sekretaris	1	Baik
6. Ruang Sidang Umum	2	Baik
7. Ruang Sidang Ramah Anak	1	Baik
8. Ruang Tunggu Bapas, BK	1	Baik
9. Ruang Tunggu Ramah Anak	1	Baik
10. Ruang Videoconference anak	1	Baik
11. Ruang Mediasi/Kaukus	1	Baik
12. Ruang Kepaniteraan	3	Baik
13. Ruang Kesekretariatan	3	Baik
14. Ruang Perpustakaan	1	Baik
15. Ruang DYK	1	Baik
16. Ruang Mushollah	1	Baik
17. Ruang Tahanan Dewasa	1	Baik
18. Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
19. Ruang Tunggu Jaksa	1	Baik
20. Ruang Posbakum	1	Baik
21. Ruang Laktasi	1	Baik
22. Ruang Arsip	3	Baik
23. Ruang PTSP dan Informasi	1	Baik
24. Ruang Tunggu Pengunjung	1	Baik
25. Area Merokok	1	Baik
26. Ruang Tunggu KPN, WKPN,	1	Baik
27. Toilet KPN, WKPN, Hakim, Panitera	4	Baik
28. Toilet Pengunjung Laki-laki/Perempuan	2	Baik
29. Toilet Disabilitas	1	Baik
30. Toilet Pengunjung PTSP	1	Baik
31. Ruang Tunggu Tamu Terbuka Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran	1	Baik
32. Ruang Server	1	Baik
33. Ruang Media Center	1	Baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan



yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court. Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

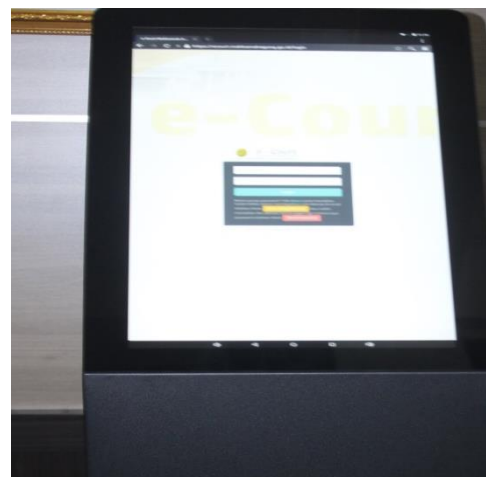


Aplikasi e-court

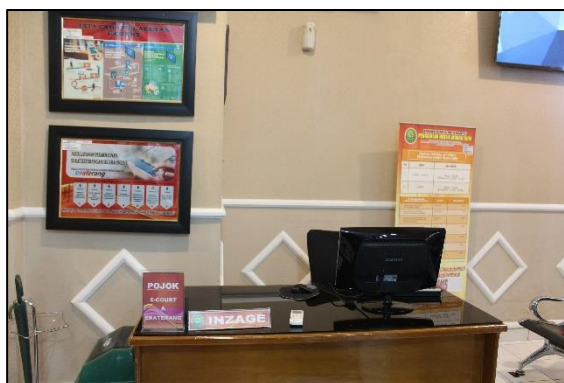
Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi e-court tersebut adalah :

1. Pemasangan sapsras pendukung e-court yaitu :

- Kios Touchscreen untuk aplikasi e-court



Kios-K Touchscreen



Pojok e-court dan eraterang

2. Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik pada tahun 2023 :

Perkara	Jumlah pengajuan secara e-court
Gugatan	34
Gugatan Sederhana	26
Permohonan	49
Permohonan Konsinyasi	3

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi



di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi pengawasan internal.

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah :

- Peningkatan bandwidth internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu bandwidth 100 Mbps.
- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 5.3.1
- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi 5.3.1 yang beralamat di <http://sipp.pn-muaraenim.go.id>

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Evaluasi Implementasi SIPP untuk Pengadilan Kelas IB Seluruh Indonesia, dengan kategori jumlah perkara 501-1000 perkara, nilai yang didapatkan untuk periode Januari sampai Desember 2023 adalah sebesar 988,22. Dengan pencapaian ini diharapkan pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mempertahankan dan meningkatkannya lagi.







Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023

evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri [Kembali](#)

Excel PDF

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Madiun	152.29	549.78	102.00	187.01	 991.08
2	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Sungai Liat	151.68	550.12	102.00	186.95	 990.75
3	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Kediri	151.07	550.28	102.00	185.78	 989.13
4	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Muara Enim	150.79	548.88	101.94	186.61	 988.22

PENCARIAN

Semua Pengadilan

501 ~ 1000 Perka IB

Januari 2023

Desember 2023

[CARI](#)



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Permenpan No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan public yang prima.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:

a. Pencanaan ZI

Pada tanggal 14 Januari 2019 Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan pencahangan zona integritas dengan dilaksanakannya acara penandatanganan piagam Zona Integritas Pengadilan Negeri Muara Enim menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Pencanaan zona integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim termasuk juga dengan melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh hakim, Aparatur Sipil Negara, dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara Enim.

b. Penetapan unit kerja;

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan

pelayanan publik; 2) Mengelola sumber. daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

c. Pembangunan unit kerja;

Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan penetapan program pembangunan Zona Integritas yang diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada Zona Integritas. Untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan.

Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan apresiasi dan penganugerahan instansi dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2019. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim. Bertempat di hotel Bidakara Jakarta, sebanyak 75 Pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawah instansi Mahkamah Agung RI berhak memperoleh predikat WBK dan dari 2 (dua) Pengadilan Negeri kelas II se-Indonesia salah satunya adalah Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Muara Enim melanjutkan Zona Integritas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan melaksanakan penilaian mandiri zona integritas melalui aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dengan nilai pembangunan Zona Integritas sebesar 98,87, yang terdiri dari :



Pengungkit (60%)				Hasil (40%)	
Pemenuhan (30%)		Reform (30%)			
Area I	95,75	Area I	100	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	99,60
Area II	100	Area II	100	Pelayanan Publik yang Prima	99,45
Area III	100	Area III	100		
Area IV	96,80	Area IV	90		
Area V	100	Area V	100		
Area VI	98,40	Area VI	100		
Total Pengungkit			98,63	Total Hasil	99,45

Hasil konkrit dari Pembangunan Zona Integritas adalah perubahan pada enam area yaitu :

Area I Manajemen Perubahan :

- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas,
- Sosialisasi Pembangunan ZI kepada stakeholder internal dan eksternal,
- Perubahan budaya kerja dan pola pikir (Pimpinan adalah role model, Penetapan agen perubahan, Disiplin waktu dan pekerjaan)

Area II Penataan Tata Laksana :

- Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam setiap proses bisnis,
- Evaluasi berkelanjutan terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan,
- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan adanya inovasi-inovasi,



- Keterbukaan informasi Publik

Area III Penataan Manajemen SDM :

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi,
- Adanya pola mutasi internal,
- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
- penggunaan aplikasi SIKEP,
- penegakan aturan disiplin dengan pemberian *reward and punishment.*,

Area IV penguatan akuntabilitas kinerja :

- Peningkatan capaian kinerja pada setiap sasaran strategis,
- Perencanaan Kinerja melibatkan semua unsur,
- Penilaian mandiri menggunakan aplikasi SEMAR

Area V Penguatan pengawasan :

- peningkatan implementasi penguatan pengawasan melalui aplikasi SIWAS, LAPOR,
- Pengendalian Gratifikasi,
- Penerapan system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Area VI dan peningkatan pelayanan public :

- Membuat standar pelayanan dan dimaklumkan,
- Membuat SOP Pelayanan,
- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan pelayanan prima,
- Terdapat layanan terpadu/terintegrasi (PTSP),
- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat yang dipublikasi dan di tindaklanjuti, Peningkatan sarana dan prasarana.



d. Pemantauan Pembangunan ZI.

Tim Penilai Internal dari Pengadilan Tinggi Palembang melaksanakan pendampingan dan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Muara Enim.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

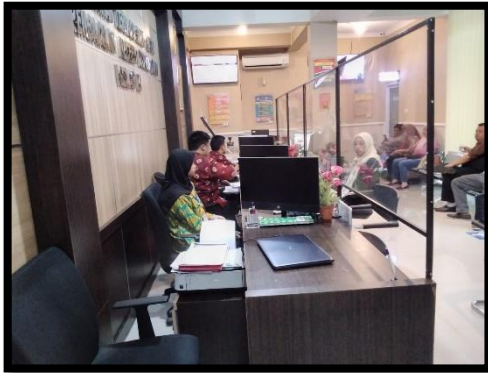
Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian

CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layanan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

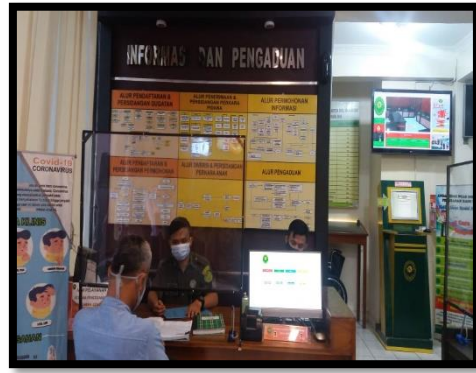
PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang
7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Mesin EDC
13. Kamera pengawas (CCTV)
14. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik
15. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.
16. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas
17. Kursi roda bagi penyandang disabilitas





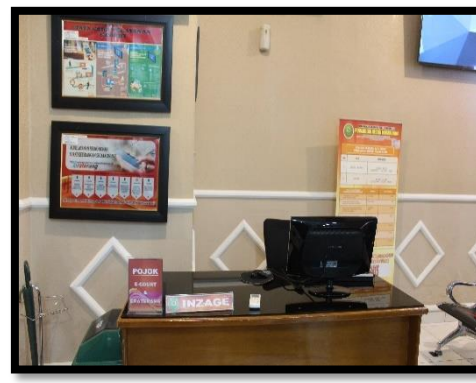
Meja PTSP



Meja Informasi dan Pengaduan
dengan antrian pengunjung



Kursi pengunjung



Meja Inzage dan Pojok e-court



Kursi roda untuk difabel



Meja tulis pengguna PTSP

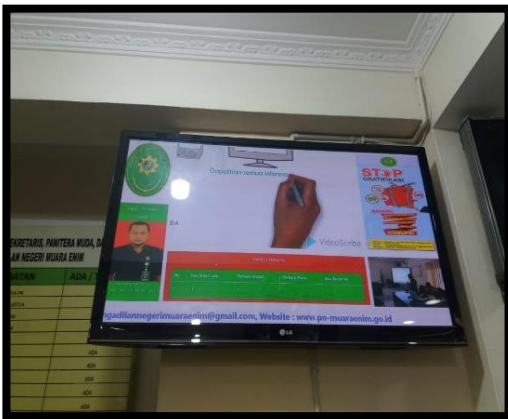




Kotak Saran



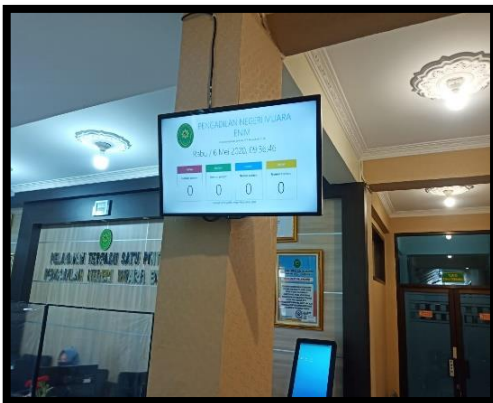
Survey IKM dan IPK secara elektronik



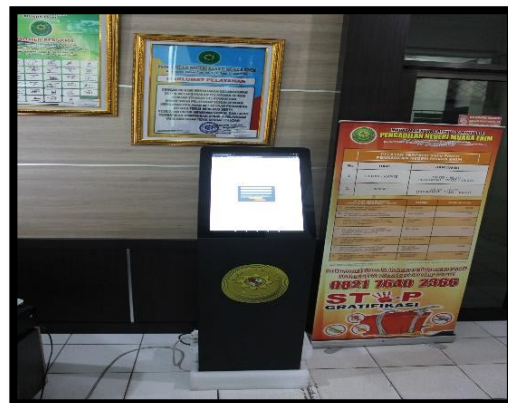
TV Profil Pengadilan



Brosur dan mesin EDC

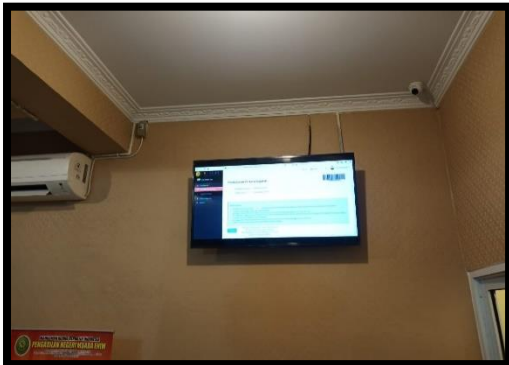


Antrian Pengunjung

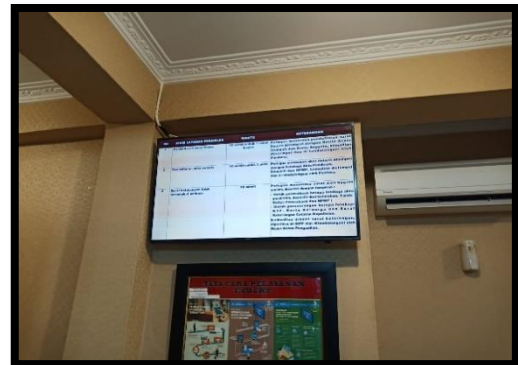


Kios-K Touchscreen e-court dan Eraterang

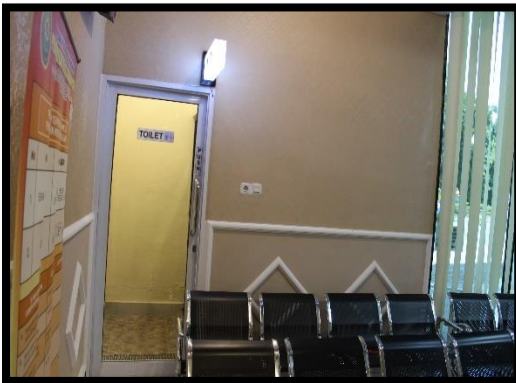




TV informasi produk PTSP



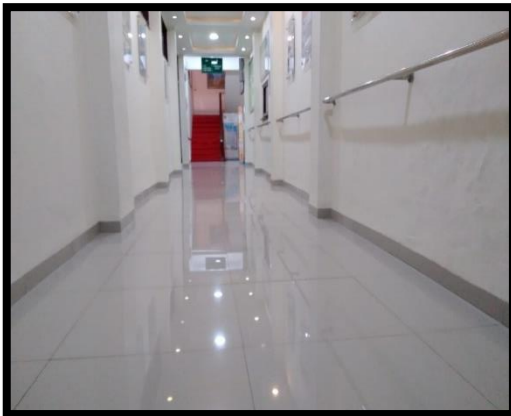
TV informasi jangka waktu pelayanan



Toilet PTSP



Ruang Tamu Terbuka



Jalur khusus difabel





Antrian Prioritas



Tongkat Kaki Tiga



Tempat Duduk Prioritas



CCTV pada PTSP

Berikut jumlah surat pada tahun 2023 :

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat Masuk	1063
2.	Surat Keluar	2568
3.	Permohonan Surat Keterangan (SUKET) pada aplikasi eraterang	3649

Untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTSP, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan survey kepuasan kepada masyarakat dan survey persepsi korupsi menggunakan aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Badan Peradilan Umum. Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2023.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	95,01	93	99,14	367	99,95	53	95,83	8
1-4	3,80		3,97		4,00		3,83	

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

SKALA	TRIWULAN 1 (JAN-MAR)	JML RESPONDEN TRW 1	TRIWULAN 2 (APR-JUN)	JML RESPONDEN TRW 2	TRIWULAN 3 (JUL-SEPT)	JML RESPONDEN TRW 3	TRIWULAN 4 (OKT-DES)	JML RESPONDEN TRW 4
1-100	97,47	82	98,10	374	99,72	54	100	8
1-4	3,90		3,92		3,99		4,00	

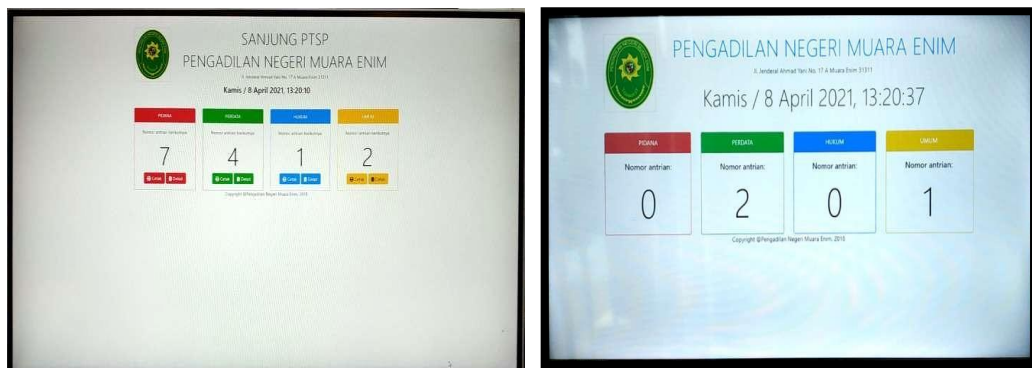
C. Inovasi Pelayanan Publik

Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat

beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada para pengguna peradilan.

1. Aplikasi Antrian Pengunjung (e-SANJUNG)

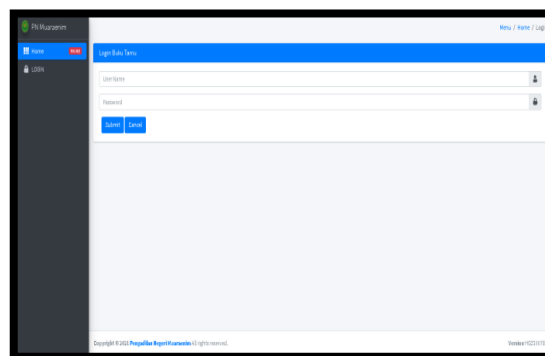
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib.



Aplikasi Sanjung (Sistem Antrian Pengunjung)

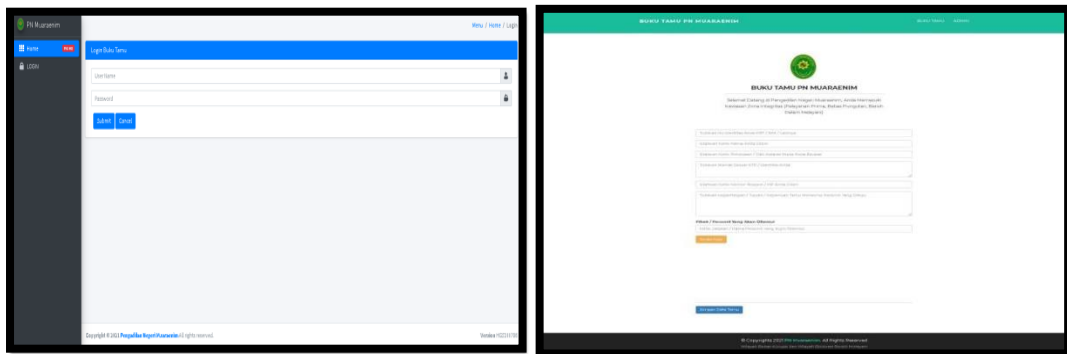
2. Buku Tamu PTSP PN Muara Enim

Buku Tamu PTSP PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Muara Enim yang memerlukan pelayanan pada meja PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram bagi Petugas meja PTSP.



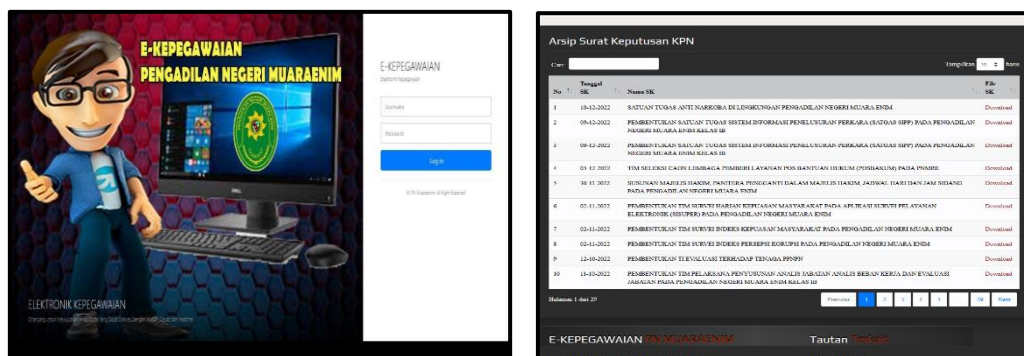
3. Buku Tamu Umum PN Muara Enim

Buku Tamu Umum PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Muara Enim diluar pelayanan yang terdapat pada meja layanan PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam Wajah dan Notifikasi via telegram bagi Pegawai.



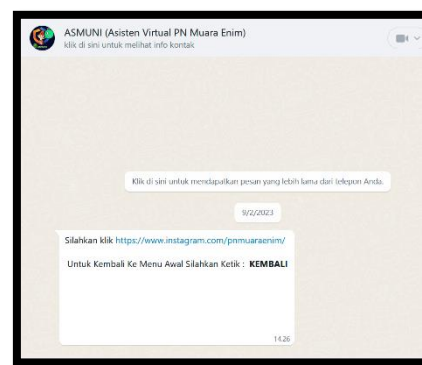
4. Aplikasi E-Kepegawaian

Aplikasi E-Kepegawaian merupakan aplikasi berbasis elektronik yang dirancang untuk mewujudkan sistem kearsipan data. Administrator dalam hal ini bidang Kepegawaian melakukan pengarsipan terkait data secara online dalam bentuk format yang diinginkan guna pencarian yang mudah dan cepat terkait arsip kepegawaian.



5. ASMUNI (Asisten Virtual PN Muara Enim)

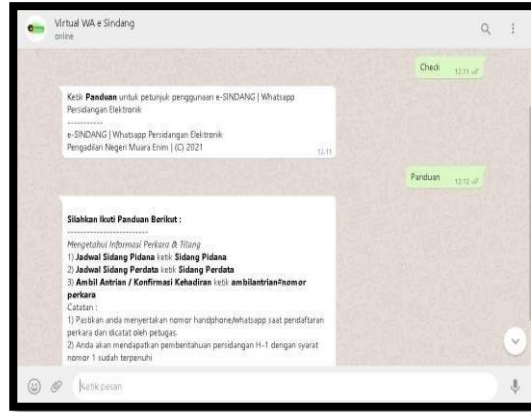
WA- AMIN merupakan Virtual Whatsapp informasi pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengunjung dapat mengakses WA-AMIN via Aplikasi Whatsapp dengan Scan Barcode atau menambahkan Kontak WA-AMIN. Pengunjung juga dapat mengakses aplikasi WA AMIN pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim.



6. Aplikasi antrian persidangan elektronik dan whatsapp informasi jadwal persidangan (e sidang)

Aplikasi ini merupakan aplikasi Pelayanan Informasi terkait jadwal sidang yang dilengkapi dengan virtual Whatsapp bagi pengunjung dan konfirmasi kesiapan Sidang bagi Pihak- Pihak terkait (JPU, Penasihat Hukum,dll).





BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah



Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2) pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.

- **Pengawasan melekat**

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana, hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan. Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan Negeri Muara Enim dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh tim penilai yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Surat keputusan dan dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir tahun kinerja para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau tidak.

- **Pengawasan rutin**

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Enim secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :
 - administrasi persidangan
 - administrasi perkara
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup:
 - administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi informasi
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan SK Nomor : W6-U6/308/KP.04.5/I/2023 tentang penunjukan Hakim pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai koordinator pengawasan.



No	Nama	Jabatan	Pengawasan Bidang
1.	Joni Mauluddin Saputra, SH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Koordinator Pengawasan
2.	Titis Ayu Wulandari, SH	Hakim	Perdata
3.	Sera Ricky Swanri S, SH	Hakim	Pidana
4.	Titis Ayu Wulandari, SH	Hakim	Hukum
5.	Shelly Noveriyati S, SH	Hakim	Umum dan Keuangan
6.	Dewi Yanti, SH	Hakim	Kepegawaian dan Ortala
7.	Dewi Yanti, SH	Hakim	PTIP

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala (rapat bulanan) oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.

B. Evaluasi

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang



dilakukan oleh tim audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan. Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga didapat kepuasan atas kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan tahunan tahun 2023 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung”*

B. Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.



2. Perlunya penambahan anggaran belanja modal untuk sarana dan prasarana serta pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan prototype.
3. Mahkamah Agung dapat mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek SIPP, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara, pedoman Layanan hukum dan penanganan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.

